

PERPRES PENUNJUKAN LANGSUNG MASIH DIPROSES 2014, HK Bangun Tol Trans-Sumatera

Oleh Eko Adityo Nugroho dan Efendi

JAKARTA – PT Utama Karya (HK) siap mengerjakan pembangunan tiga ruas jalan tol Trans-Sumatera pada 2014 senilai Rp 8,3 triliun. Tiga ruas itu merupakan bagian dari 22 ruas Trans-Sumatera yang harus dikerjakan HK hingga 2025, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp 360 triliun.

Sekretaris Perusahaan Utama Karya Ari Widianoro menjelaskan, saat ini manajemen tinggal menunggu keluarnya peraturan presiden tentang penunjukan langsung HK untuk menggarap ruas tol itu dan kepastian tentang adanya penyertaan modal negara (PMN). HK membutuhkan PMN sekitar Rp 5 triliun untuk tahun ini dari rencana total PMN

sebesar Rp 15 triliun.

Soal pendanaan tidak menjadi masalah. Demikian pula soal pembebasan lahan, HK menggandeng PTPN agar proyek tol ini banyak melewati lahan-lahan milik PTPN, sehingga biaya pun bisa ditekan.

"Kami siap bangun tiga ruas itu, tetapi tetap harus menunggu perpres dan penyertaan modal negara (PMN) itu keluar," ungkap Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Ari Widianoro saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (21/2).

Ketiga ruas itu adalah ruas Medan-Kuala Lumpur-Tebing Tinggi, kemudian Bakauheni-Bandar Lampung, dan Palembang-Indralaya. Sedangkan panjang 22 ruas tol keseluruhan adalah 2.696 kilometer dengan target selesai pada 2025. Ini berarti tiap tahunnya HK harus

3 Koridor Jalan Tol Prioritas Trans Sumatera

Ruas	Panjang	IRR	Estimasi investasi
Palembang-Bengkulu	303 km	9%	Rp 63 triliun
Pekanbaru-Padang	242 km	10%	Rp 35 triliun
Medan-Sibolga	175 km	7%	Rp 30 triliun
TOTAL	720 km		Rp 128 triliun

sumber: Kemen PU

4 Koridor Jalan Tol Utama Trans Sumatera

Ruas	Panjang	IRR	Estimasi investasi
Lampung-Palembang	358 km	17%	Rp 44 triliun
Palembang-Pekanbaru	610 km	13%	Rp 95 triliun
Pekanbaru-Medan	548 km	16%	Rp 64 triliun
Medan-Banda Aceh	460 km	9%	Rp 95 triliun
TOTAL	1.976 km		Rp 298 triliun

sumber: Kemen PU



membangun ruas tol rata-rata 225 kilometer.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menunjuk Utama Karya sebagai BUMN yang akan membangun jalan tol Trans-Sumatera. Dalam skenario pemerintah tersebut, HK akan dijadikan BUMN yang khusus menangani pembangunan ruas tol yang tidak prospektif/layak secara finansial, sehingga tidak akan pernah di-go publickan.

▶ Bersambung ke hal 11

Sumber: Dic

► Sambungan dari hal 1

Sedangkan Jasa Marga tetap menjadi BUMN yang membangun ruas tol khusus yang prospektif.

Ari Widiantoro menjelaskan, perusahaan membutuhkan payung hukum agar bisa mengerjakan ruas tol Trans-Sumatera tersebut sesuai rencana. Perusahaan juga membutuhkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun pada tahun ini guna meningkatkan likuiditas perusahaan.

Dia menambahkan, sebelum membangun jalan tol itu, HK juga membutuhkan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pembangunan jalan tol membutuhkan pula perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) untuk melihat kelayakan investor dari sisi kemampuan membangun dan pendanaan.

Payung hukum lainnya yang dibutuhkan adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol untuk mengakomodasi penunjukan langsung pemerintah terhadap BUMN untuk membangun jalan tol. Saat ini, revisi PP tersebut sudah berada di Sekretariat Kabinet.

"Kalau tidak ada, basis legalnya bagi HK jadi lemah," kata Ari. Sebab, dalam PP 15/2005, pembangunan jalan tol harus dilakukan lewat tender.

Tiga Skenario

Menurut Ari, saat ini sumber pembiayaan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera masih dibahas di Kementerian Keuangan. Ada tiga opsi yang dibahas, yakni apakah pola pembangunannya menggunakan porsi 30% ekuitas dan 70% pinjaman, PMN murni, atau divestasi (selesai dibangun, ruas tol itu langsung dijual).

Dia mengaku, HK membutuhkan PMN untuk tahun ini sebesar Rp 5 triliun agar bisa mengerjakan pembangunan tiga ruas tersebut. "Nanti pada 2014 ada PMN lagi," kata dia.

UU APBN 2013 yang telah disahkan DPR-RI tidak memasukkan PMN bagi Hutama Karya, sehingga usulan tersebut kemungkinan ditampung dalam pembahasan APBN-Perubahan.

Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Bappenas Bastary Pandji Indera mengatakan, Hutama Karya akan mendapatkan dukungan PMN sebesar Rp 15 triliun sebagai pihak yang akan membangun jalan tol Trans-Sumatera.

Untuk itu, pemerintah berupaya secepat mungkin agar dana PMN bisa segera cair. Menurut dia, pemerintah akan mematok waktu satu atau dua tahun agar PMN bisa segera terealisasi dengan baik.

Bastary menilai, jika proyek tol Trans-Sumatera rampung, perekonomian di Sumatera akan semakin berkembang. Sektor perkebunan dan kehutanan berpotensi menjadi sektor fa-

vorit. Apalagi Sumatera kaya sumber daya alam, terutama di sektor perkebunan seperti tebu, karet, dan kopi.

11 Pusat Pertumbuhan

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum Danis H Sumadilaga mengungkapkan, tol Trans-Sumatera akan menghubungkan 11 kota pusat pertumbuhan ekonomi, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Padang, Tanjung Pinang, Lampung, Bengkulu, dan Serang.

Kota-kota itu banyak memproduksi kelapa sawit, karet, batubara, perkapalan, besi baja, dan kawasan strategis nasional Selat Sunda.

Dalam MP3EI, pemerintah telah menetapkan empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol di Sumatera. Keempat koridor utama itu adalah Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer (km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km), dan Medan-Banda Aceh (460 km). Estimasi investasi pengerjaan empat koridor jalan tol sepanjang 1.976 km itu sekitar Rp 298 triliun.

Sedangkan tiga koridor prioritas adalah jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km), dan Medan-Sibolga (175 km). Total tiga jalan prioritas ini 720 km dengan estimasi investasi Rp 128 triliun.

Menurut Danis, dari keempat koridor jalan tersebut, yang layak dibangun terlebih dahulu adalah Lampung-

Palembang dan jalan Pekanbaru-Medan. Hal itu dikarenakan arus lalu lintas di kedua ruas jalan tersebut lebih tinggi dibanding lainnya.

Pemerintah selama 2012-2014 mempersiapkan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera tersebut, dengan target sebagian ruas bisa selesai pada 2017.

Proses persiapan yang dilakukan antara lain pembebasan lahan dan pengkajian besaran dana dukungan pemerintah atau *viability gap fund* (VGF). "Namun kalau proses tanahnya cepat selesai, bisa segera dibangun," tambah Danis.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fachrur Rochman mengungkapkan, meskipun peraturan presiden belum keluar, Hutama Karya bisa segera memulai proses persiapan pembangunan tiga ruas tol Trans-Sumatera. Persiapan itu antara lain melakukan studi kelayakan (*feasibility study*), menyusun *detail engineering design* (DED), perizinan, hingga analisis dampak lingkungan.

"Kalau proses persiapan ini tidak dilakukan sekarang, bisa saja tidak selesai pada 2017," jelas Fachrur.

Fachrur menambahkan, proses pembebasan lahan tetap menjadi kendala terbesar dalam pembangunan tol tersebut. Namun begitu, dia mengusulkan penggunaan UU No 2/2012 sebagai payung hukum proses pembebasan lahan.

Pt Deputy Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Imam Putro menuturkan, pihaknya masih membahas pendanaan pembangunan tol Trans-Sumatera. Namun, dukung-

an semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dibutuhkan guna merealisasikan pembangunan proyek tersebut.

Salah satu opsi yang dikaji adalah bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui pendirian anak usaha Hutama Karya guna membantu pembebasan lahan. Namun, sejauh ini, Hutama Karya baru menggandeng BUMN perkebunan, yakni PTPN, guna mengantisipasi sulitnya membebas lahan. Ini berarti, ruas tol tersebut akan melewati lahan-lahan perkebunan milik PTPN-PTPN, sehingga biaya lebih

murah.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, revisi PP No 15/2005 tentang Jalan Tol sudah hampir final karena draf tersebut sudah berada di Sekretariat Kabinet (Setkab). Salah satu klausul revisi peraturan itu adalah memasukkan penunjukan pemerintah terhadap BUMN untuk membangun jalan tol.

Selain revisi PP, pemerintah akan mengeluarkan perpres yang berisi penunjukan langsung terhadap salah satu BUMN untuk mengerjakan proyek tol. (nti/c05)